

Daftar Pustaka

Buku

- Ani Sri Rahayu, 2019, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Jakarta: Bumi Aksara.
- Aminuddin Ilmar, 2014, HUKUM TATA PEMERINTAHAN, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Andi Pangerang Moenta & Syafa'at Anugrah Perdana, 2018, *POKOK-POKOK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH*, Makassar: Rajawaligrafindo Persada.
- Attamimi, A, Hamid S, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly dan Safa'at, M. Ali., 2006, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: Ind Hill Co.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni.
- Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rAngka Otonomi Daerah*, Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Buntara, Syera Anggreini dan Hasani, Ismail (2022). Mengatasi Intoleransi, Merangkul Kebereagaman: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2021, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta
- Charles Simabura, 2022, Peraturan Menteri Dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan UUD NRI 1945, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Farida, Maria, 1998, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: Kanisius.
- Hans Kelsen, 2009, General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge.
- Hans Kelsen, 2013, Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Normatif, ahli bahasa, Raisul Muttaqien Cet.Ke-X, Nusa Media.
- Hazairin, 1983, *Demokrasi Pancasila*, cetakan keempat, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hotma P. Sibuea, 2010, Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Erlangga.
- Ismail Hasani (ed), Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan,

- Pustaka Masyarakat SETARA, Jakarta.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Mitra Buana Media.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusional dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2016, "*Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*" Cetakan Ke-III, Bandung: Nuansa.
- Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- King Faisal Sualiman, 2017, *Teori Peraturan PerUndang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Kamus Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Laica Marzuki, 2010, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel): Hakikat serta Fungsinya selaku Sarana Hukum Pemerintahan*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Lutfi Effendi dan Sri Kustina, 2000, *Hukum Adiministrasi (Administratief Recht)*, Malang: Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum.
- Muhamad Tahir Azhary, 2003, *NEGARA HUKUM: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Marbun, S.F., 2003, *Pendidikan Administrasi dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, Jogjakarta: UII Press.
- Maria Farida Indrati S, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1998, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta.
- Natabaya, H.A.S., 2006, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Sekjend Mahkamah Konstitusi RI
- Natan Lerner, 2010, *Sifat dan Standar Minimum Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Seberapa Jauh?*, Yogyakarta: kanesius.
- N. H. T. Siahaan, 2009, "*Hukum Lingkungan*", Jakarta: Pancuran Alam.
- Nuhfil Hanani, 2020, *PANCASILA Konteks Sejarah, Filsafat, Ideologi Nasional, dan*

Ketatanegaraan Republik Indonesia, Malang: Madani Media (Intrans Publishing Group).

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon dalam Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Kencana.

Ridwan H.R., 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sutedi Adrian, 2011, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

S. Prajudi Atmosudirdjo, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

S. Prajudi Atmosudirjo, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD NRI Tahun 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi Revisi), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Ujang Charda, 2018, *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Untuk Pendidikan Tinggi*, Subang: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal

Ali Marwan HSB & Valentina Shanty, 2021, *Dikresi Sebagai Dasar Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah Penelitian LAW JURNAL

Antonio, A., Munir, A., & Sholihan, S., 2024, *Persetujuan Bangunan Gedung Atas Kontainer Yang Digunakan Sebagai Hunian Permanen*, Law Specialist Jurnal Ilmiah Hukum, 1(01).

Asyikin, N., 2020, *Freies Ermessen Sebagai Tindakan atau Keputusan Pemerintah Ditinjau dari Pengujiannya*. DIVERSI: Jurnal Hukum, 5(2).

Ardiansah, 2016, *"Legalitas Pendirian Rumah Ibadah Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006"*, Jurnal Hukum Respublica, Volume 16 Nomor 1, Universitas Lancang Kuning.

Berty Theresia Simanullang, et.al., 2021, *Peraturan Tata Ruang Dalam Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Pada Rumah Ibadah*, Mendapo: Journal of Administrative Law, Nomor 2 Volume 1, 41–50.

<https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i1.11461>

- Debataraja, L., 2022, *Penentuan Persyaratan Dukungan Masyarakat Di Lingkungan Pendirian Rumah Ibadah Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006*. EKSEKUSI, 4(2)
- Gunawan Santoso, et.al., 2023, *Implementasi Bhinneka Tunggal Ika dan Cita-Cita Luhur Bangsa Indonesia Versi Generasi Z*, Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra), Volume 02 Nomor 02, Universitas Muhamadiyah Jakarta.
- Hakim Naufal, 2023, *Permasalahan Izin Pendirian Tempat Ibadah dan Problematika Toleransi Keagamaan di Indonesia*. Gema Keadilan. 10. 72-79. 10.14710/gk.2023.20347
- Hatta, M., & Zulfan, H., 2021, *Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensi Hukumnya*, Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(2), 342. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.4532>
- Junaidi, 2013, *"Analisis Yuridis Keberadaan Peraturan Bersama Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia"*, Jurnal Nestor Magister Hukum Universitas Tanjungpura Volume 3 Nomor 5.
- Khotimatul Husna & Mahmud Arif, 2021, *"IBADAH DAN PRAKTIKNYA DALAM MASYARAKAT"*, TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam Volume 4 Nomor 2.
- Maya Cristiana, 2022, *Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia*, PROGRESIF: Jurnal Hukum, Volume XVI, Nomor 2, Universitas Gadjah Mada.
- Miftah, F., et.al., 2022, *Kepastian hukum penerbitan persetujuan bangunan gedung (pbg) dalam penerbitan izin usaha di Kota Surabaya*. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1 Nomor 7.
- Ni'matul Huda, 2006, *"Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan"*, Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 13.
- Putri, R. N. H & Andini, V. D., 2025, *Analisis Kasus Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon dan Penyelesaiannya Dengan Menggunakan Pendekatan Teori Moderasi Beragama* Nusantara, Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora, Nomor 2 Volume 2.
- Rezky Adi Pinandito, 2017, *Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, (Studi Kasus: Tanggung Jawab Negara dalam Konflik Samapang, Madura)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Universitas Sultan Agung.
- Siphotulloh Mujaddidi, 2021, *Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia*

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Volume 18 Nomor 3, Universitas Gadjra Mada.

Syihabudin, 2003, *"Kajian Terhadap Jenis dan Tata urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia"*, Jurnal Hukum, Nomor 23 Volume 10.

Xavier Nugraha & Pradnya Wicaksana, 2021, *Keadilan Proporsional Sebagai Landasan Filosofis Pengaturan Perizinan Pendirian Tempat Ibadah*, Jurnal Jatiswara Volume 36 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

Yossa A.P Nainggolan, 2021, Hak Atas Kebebasan Beragama dan/atau Berkeyakinan: Forum Internum dan Forum Eksternum, Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume 6 Nomor 6.

Zulkarnain, Iskandar, 2011, *"Hubungan Antar komunitas Agama di Indonesia: Masalah dan Penanganannya"*, Jurnal Kajian Volume 16 Nomor 4.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar tahun 1945;

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Internasional Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik;

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalagunaan Dan/atau Penodaan Agama.

Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Keukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Web

SETARA Institute for Democracy and Peace, SETARA INSTITUTE CATAT 329 PELANGGARAN KBB SEPANJANG 2023 <https://setara-institute.org/setara-institute-catat-329-pelanggaran-kbb-sepanjang-2023/>

Setara Institute for Democracy and Peace. (2019). Mengatasi Polemik Pendirian Rumah Ibadat. Setara Institute for Democracy and Peace. Retrieved from <https://setara-institute.org/bookreview/mengatasi-polemik-pendirianrumah-ibadat/>